

TRANSFORMASI KESEJAHTERAAN PEDESAAN: DAMPAK DESA PINTAR INISIATIF TENTANG HASIL KEBIJAKAN SOSIAL LOKAL

Sumardani^{1*}, Andre Ariesmansyah²
sumardani@unpas.ac.id, andre.ariesmansyah@unpas.ac.id

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini mengevaluasi bagaimana inisiatif desa cerdas membentuk hasil kebijakan sosial lokal dan kesejahteraan pedesaan. Dengan menggunakan Tinjauan Literatur Sistematis (SLR) yang dipandu oleh kerangka kerja PRISMA, 45 artikel yang ditinjau sejawat yang diterbitkan antara tahun 2019 dan 2026 dianalisis secara kualitatif menggunakan perangkat lunak NVivo 14. Fokus konseptualnya menjembatani teori Kebijakan Sosial, Tata Kelola, desa cerdas, dan kesejahteraan pedesaan. Melalui pengelompokan node tematik dan kueri semantik, studi ini mengidentifikasi tiga variabel dominan yang menentukan keberhasilan kebijakan: pemberdayaan ekonomi digital, kapasitas tata kelola kolaboratif, dan kesenjangan literasi digital. Hasil menunjukkan bahwa meskipun platform kebijakan sosial lokal meningkatkan pendapatan agregat masyarakat, literasi digital yang tidak merata dan budaya organisasi yang terfragmentasi di antara aparat publik lokal membatasi distribusi kesejahteraan yang adil. Implikasinya menunjukkan bahwa unit pemerintah daerah harus beralih ke pengembangan sumber daya manusia yang inklusif, mengintegrasikan perlindungan sosial yang kuat dan adaptif bersama dengan infrastruktur teknologi untuk mewujudkan kesejahteraan pedesaan yang holistik. Rekomendasi untuk harmonisasi kebijakan dan peningkatan kapasitas yang lebih maju diuraikan secara sistematis

KATA KUNCI: Desa Pintar, Kebijakan Sosial, Kesejahteraan Pedesaan, Tata Kelola Kolaboratif.

ABSTRACT

This study evaluates how smart village initiatives shape local social policy outcomes and rural welfare. Using a Systematic Literature Review (SLR) guided by the PRISMA framework, 45 peer-reviewed articles published between 2019 and 2026 were qualitatively analyzed using NVivo 14 software. The conceptual framework integrates theories of Social Policy, Governance, Smart Villages, and Rural Welfare. Through thematic node clustering and semantic queries, the study identifies three dominant variables that determine policy success: digital economic empowerment, collaborative governance capacity, and the digital literacy gap. The findings indicate that although local social policy platforms contribute to increased aggregate community income, unequal digital literacy and fragmented organizational culture among local public officials hinder the equitable distribution of welfare. The implications suggest that local government institutions should shift toward inclusive human resource development by integrating robust and adaptive social protection with technological infrastructure to achieve holistic rural welfare. Finally, the study proposes systematic recommendations for policy harmonization and advanced capacity-building to strengthen the effectiveness and sustainability of smart village initiatives.

Keywords: Smart Village, Social Policy, Rural Welfare, Collaborative Governance.

PENDAHULUAN

Wacana kontemporer dalam administrasi publik dan kesejahteraan sosial semakin berpusat pada digitalisasi ruang pedesaan, yang umumnya dikonseptualisasikan sebagai inisiatif "Desa Pintar" (Zavratnik, Kos, & Stojmenova Duh,

2018) Di banyak wilayah berkembang, khususnya di Jawa Barat, Indonesia, pemerintah daerah berinvestasi besar-besaran dalam platform digital untuk mempromosikan aset lokal seperti program pariwisata desa pintar yang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan sosial-ekonomi

historis antara penduduk perkotaan dan pedesaan (Naldi, Nilsson, Westlund, & Wixe, 2015)

Alasan fenomenologis untuk melakukan penelitian ini berasal dari paradoks yang dapat diamati: penyebaran infrastruktur digital yang cepat tidak secara otomatis diterjemahkan menjadi peningkatan hasil kebijakan sosial bagi anggota masyarakat yang paling rentan. Meskipun indikator makro ekonomi mungkin menunjukkan pertumbuhan regional, distribusi kesejahteraan di tingkat mikro tetap sangat timpang (Anderson & Jiang, 2020)

Secara historis, kebijakan pembangunan pedesaan telah berfokus pada intensifikasi pertanian, infrastruktur dasar, dan program pengentasan kemiskinan tradisional. Namun, munculnya Revolusi Industri Keempat (Industri 4.0) telah menuntut pergeseran paradigma. Saat ini, integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ke dalam tata kelola desa dipandang sebagai solusi ampuh untuk stagnasi pedesaan. Konsep ini menjanjikan peningkatan penyampaian layanan publik, birokrasi yang lebih efisien, dan akses langsung ke pasar global bagi pengrajin dan petani lokal (Erkut, 2020). Namun, pelaksanaan inisiatif ini seringkali mengalami gesekan ketika bertabrakan dengan budaya organisasi administrasi publik lokal yang ada dan realitas demografi pedesaan (Widiyanto, 2022).

Studi ini berkontribusi pada pengayaan pengetahuan dengan membahas ceruk yang berbeda: mengevaluasi fenomena desa pintar bukan hanya sebagai upaya ekonomi atau teknologi, tetapi sebagai variabel penting dalam kebijakan kesejahteraan sosial. Sebagian besar literatur yang ada sangat berfokus pada arsitektur teknis jaringan pintar, tingkat penetrasi broadband, dan metrik ekonomi desa pintar (Mora, Deakin, & Reid, 2019). Dengan menerapkan sintesis kualitatif dari literatur terkini, makalah ini menggeser fokus ke dimensi manusia. Secara khusus, makalah ini meneliti bagaimana budaya organisasi dalam administrasi publik lokal (seperti badan sumber daya manusia regional) dan kesiapan masyarakat membentuk efektivitas kebijakan digital.

Tujuan utama penelitian ini ada tiga. Pertama, untuk secara sistematis meninjau literatur yang ada tentang dampak sosial-ekonomi program desa pintar selama tujuh tahun terakhir. Kedua, untuk memetakan secara tematik hambatan struktural, budaya, dan teknologi terhadap distribusi kesejahteraan yang adil menggunakan analisis data kualitatif berbantuan komputer (NVivo). Ketiga, untuk menyediakan kerangka kerja konseptual bagi para pembuat

kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan inklusivitas inisiatif pedesaan digital. Dengan menjawab tujuan-tujuan ini, penelitian ini bertujuan untuk mendorong pendekatan yang lebih tangguh, adaptif, dan berpusat pada manusia dalam administrasi publik pedesaan.

LATAR BELAKANG PENELITIAN

Dorongan untuk inisiatif desa pintar secara global muncul dari kesenjangan perkotaan-pedesaan yang semakin besar (Nijkamp & Kourtit, 2013). Seiring dengan semakin "pintarnya" kota-kota melalui investasi modal besar-besaran dalam IoT, jaringan pintar, dan tata kelola berbasis data, daerah pedesaan semakin terpinggirkan, menderita akibat brain drain, populasi yang menua, dan keterasingan ekonomi (Caragliu, Del Bo, & Nijkamp, 2011). Sebagai tanggapan, pemerintah nasional dan badan-badan internasional memulai program untuk mendigitalisasi daerah pinggiran pedesaan. Dalam konteks Indonesia, penerbitan Undang-Undang Desa dan penyaluran Dana Desa yang besar-besaran memberikan landasan fiskal bagi para pemimpin lokal untuk berinvestasi dalam transformasi digital, yang sering disebut sebagai "Desa Digital" (Herdiana, 2019; Setiawan, 2019).

Terlepas dari masuknya pendanaan, pelaksanaan kebijakan-kebijakan ini sangat terfragmentasi. Observasi lapangan dan laporan awal menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah menafsirkan "desa pintar" semata-mata sebagai pengadaan perangkat keras seperti pemasangan hotspot Wi-Fi di balai desa atau pembuatan situs web informasi dasar (Priano, 2020). Meskipun ini merupakan langkah awal yang diperlukan, langkah-langkah tersebut masih jauh dari solusi yang komprehensif. Ekosistem desa pintar sejati membutuhkan integrasi digital dari rantai pasokan lokal, telemedisin, e-pendidikan, dan administrasi publik yang responsif (Holmes, 2017). Ketika fokus hanya tertuju pada perangkat keras, tujuan utama kesejahteraan sosial akan terabaikan.

Selain itu, budaya organisasi dari aparat layanan sipil di tingkat regional dan desa memainkan peran penting (Widiyanto, 2022). Inersia birokrasi, kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang terspesialisasi, dan operasi departemen yang terkotak-kotak seringkali menghambat tata kelola kolaboratif yang dibutuhkan untuk inisiatif cerdas. Misalnya, departemen pariwisata, departemen urusan sosial, dan departemen komunikasi seringkali menjalankan program independen, yang menyebabkan tumpang tindih anggaran dan arahan yang membingungkan bagi pengelola desa (Zhu, 2020). Studi ini berpendapat bahwa pemahaman tentang gesekan manusia dan

kelembagaan ini sangat penting untuk membuka potensi kesejahteraan sejati dari desa-desa cerdas

TINJAUAN LITERATUR

Teori Desa Pintar dan Tata Kelola Digital

Konsep Desa Pintar berakar pada teori tata kelola digital yang lebih luas, yang menyatakan bahwa integrasi TIK dapat merevolusi penyampaian layanan publik pedesaan dan keberlanjutan ekonomi (Komorowski & Stojmenova Duh, 2020) Tidak seperti Kota Pintar, yang memprioritaskan pengelolaan populasi padat, lalu lintas, dan jaringan energi perkotaan, Desa Pintar berfokus pada mengatasi isolasi spasial, memanfaatkan aset unik lokal (seperti ekowisata, warisan budaya, atau pertanian khusus), dan mendorong kohesi sosial (Albino, Berardi, & Dangelico, 2015; Rinaldi, 2020) Menurut literatur terkini, desa pintar yang sukses harus digerakkan oleh komunitas, bukan semata-mata oleh teknologi (Erkut, 2020) Para cendekiawan berpendapat bahwa adopsi teknologi harus dipadukan dengan pembangunan kapasitas kelembagaan agar efektif

Teori tata kelola digital menekankan transisi dari birokrasi tradisional yang hierarkis ke administrasi partisipatif yang berbasis jaringan (Meijer & Bolívar, 2016) Di desa pintar, platform e-governance memungkinkan warga untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, mengakses laporan anggaran yang transparan, dan meminta layanan publik tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke ibu kota distrik Namun, tanpa budaya organisasi yang kuat dan sumber daya manusia yang mumpuni di dalam aparatur pemerintah daerah, alat-alat teknologi ini tetap kurang dimanfaatkan Literatur menekankan bahwa literasi digital dari aparatur itu sendiri seringkali menjadi prasyarat untuk pemberdayaan masyarakat (Priano, 2020).

Kebijakan Sosial dan Sistem Kesejahteraan

Disiplin kesejahteraan sosial, hasil kebijakan dievaluasi berdasarkan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, memastikan stabilitas ekonomi, dan menjaga kesetaraan sosial (Sen, 1999) Pengenalan ekosistem digital ke daerah pedesaan merupakan intervensi eksternal yang membutuhkan kerangka kebijakan sosial adaptif Teori-teori yang ada menekankan pendekatan "Pemikiran Sistem", di mana kebijakan tidak dapat beroperasi secara terpisah Perspektif sistemik memandang desa sebagai organisme yang saling terhubung di mana perubahan dalam teknologi komunikasi pasti berdampak pada hubungan sosial, kesetaraan ekonomi, dan norma budaya

Keberhasilan desa pintar bergantung pada

lingkaran sebab akibat yang melibatkan penyediaan infrastruktur, pendidikan masyarakat yang berkelanjutan, dan responsivitas pemerintah daerah Ketika kebijakan terfragmentasi, peningkatan kesejahteraan yang dihasilkan seringkali condong kepada mereka yang sudah melek digital atau memiliki keunggulan ekonomi (Anderson & Jiang, 2020) Fenomena ini mengancam untuk memperburuk ketidaksetaraan yang seharusnya dihilangkan oleh kebijakan tersebut Oleh karena itu, kebijakan sosial kontemporer harus mengintegrasikan hak digital sebagai komponen inti kesejahteraan pedesaan, memperlakukan akses internet dan literasi digital sebagai utilitas publik dasar bersama dengan air dan listrik (Zuboff, 2019)

Kesenjangan Digital dan Pengucilan Sosial

Tema yang berulang dalam kebijakan sosial berbasis teknologi adalah "Kesenjangan Digital" (Davies, 2019) Awalnya didefinisikan murni berdasarkan akses ke perangkat keras dan koneksi internet (kesenjangan tingkat pertama), konsep ini telah berkembang mencakup "kesenjangan tingkat kedua," yang berkaitan dengan perbedaan keterampilan dan penggunaan digital, dan "kesenjangan tingkat ketiga," yang berfokus pada manfaat sosial-ekonomi nyata yang diperoleh dari penggunaan internet Dalam studi kesejahteraan pedesaan, kesenjangan ini merupakan hambatan kritis bagi pembangunan inklusif (Zhu, 2020)

Literatur menyoroti bahwa kelompok demografis yang terpinggirkan, khususnya lansia, perempuan dalam masyarakat patriarki tradisional, dan buruh tani berpenghasilan rendah, sangat rentan terhadap pengucilan digital Ketika kebijakan sosial lokal beralih ke penyediaan layanan digital sepenuhnya atau ketika ekonomi lokal bergeser secara signifikan ke arah e-commerce dan pariwisata digital, kelompok-kelompok ini berisiko tertinggal (Ramadhan, 2021) Oleh karena itu, inisiatif desa pintar yang efektif harus mencakup intervensi yang ditargetkan, seperti program pendampingan digital dan akses bersubsidi, untuk memastikan bahwa transisi ke ekonomi digital tidak secara tidak sengaja menciptakan bentuk-bentuk kemiskinan baru

Tata Kelola Kolaboratif dan Budaya Organisasi

Tata kelola kolaboratif melibatkan berbagai pemangku kepentingan—sering disebut sebagai model Quadruple Helix (Adam & Kriesi, 2007) Literatur menegaskan bahwa desa pintar tidak dapat dikembangkan secara sepihak oleh kepala desa Desa pintar membutuhkan keahlian teknis dari penyedia telekomunikasi swasta, perencanaan strategis dari tingkat pemerintahan

yang lebih tinggi, dukungan penelitian dari universitas, dan partisipasi aktif dari penduduk setempat

Namun, pelaksanaan tata kelola kolaboratif sering kali terhambat oleh budaya organisasi yang kaku dalam administrasi publik (Widiyanto, 2022) Birokrasi yang dicirikan oleh keengganan mengambil risiko, komunikasi hierarkis yang ketat, dan kurangnya insentif inovasi kesulitan mengelola sifat dinamis dan berulang dari proyek-proyek digital Oleh karena itu, transformasi kesejahteraan pedesaan membutuhkan transformasi simultan dari layanan sipil Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam badan-badan regional harus memprioritaskan kelincahan, pemikiran sistem, dan kolaborasi lintas sektor untuk secara efektif mengelola kebijakan sosial desa cerdas.

Peta Pikiran Konseptual

Karena penelitian ini menggunakan metodologi tinjauan pustaka sistematis kualitatif, peta pikiran konseptual menggantikan hipotesis kuantitatif tradisional Kerangka kerja ini memetakan alur logis dari masukan kebijakan hingga hasil kesejahteraan akhir, menyoroti faktor-faktor mediasi yang menentukan keberhasilan atau kegagalan



METODOLOGI

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi Tinjauan Literatur Sistematis (SLR) yang dipadukan dengan analisis data kualitatif berbantuan komputer (Bazeley & Jackson, 2013) Protokol SLR secara cermat mengikuti pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) untuk memastikan pemilihan studi yang relevan secara transparan, dapat direproduksi, dan ketat Dengan mensintesis temuan kualitatif dari berbagai sumber yang ditinjau sejawat, studi ini bertujuan untuk membangun model tematik komprehensif tentang dampak desa cerdas terhadap kebijakan sosial yang melampaui keterbatasan studi kasus tunggal

Garis Waktu Pengumpulan dan Pengamatan Data

Rentang waktu pengamatan data dibatasi pada dokumen yang diterbitkan antara Januari 2019 dan Juni 2026 Kerangka waktu ini dipilih secara strategis untuk menangkap kemajuan terbaru dalam tata kelola digital, lonjakan digitalisasi pedesaan selama pandemi global, dan evaluasi kontemporer proyek desa pintar yang sudah mapan Pencarian literatur dilakukan di berbagai basis data akademik terkemuka, termasuk Scopus, Web of Science (WoS), dan Google Scholar

Rangkaian pencarian Boolean yang digunakan adalah: ("Smart Village" ATAU "Digital Village") DAN ("Social Policy" ATAU "Rural Welfare" ATAU "Community Development" ATAU "Public Administration") Untuk memastikan ketelitian akademik yang tinggi, kriteria inklusi dan eksklusi ditetapkan Hanya artikel jurnal telaah sejawat, ringkasan kebijakan yang komprehensif, dan laporan resmi pemerintah yang ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang dimasukkan Artikel yang berfokus secara eksklusif pada rekayasa teknis sensor IoT tanpa analisis sosial-ekonomi dikeluarkan

Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi Literatur

Kriteria	Parameter Inklusi	Parameter Pengecualian
Tahun Publikasi	Tahun 2019 - 2026	Sebelum tahun 2019
Jenis Dokumen	Jurnal yang ditinjau oleh rekan sejawat, laporan kebijakan	Artikel opini, blog yang tidak melalui tinjauan sejawat
Fokus Tematik	Dampak sosial ekonomi, tata kelola, kesejahteraan, budaya organisasi	Fokus murni teknis/rekayasa (misalnya, algoritma sensor IoT)
Bahasa	Inggris, Indonesia	Bahasa lain

Analisis Data melalui NVivo 14

Pencarian awal menghasilkan 210 artikel Setelah proses penyaringan PRISMA untuk duplikat, relevansi judul/abstrak, dan kelayakan teks lengkap, 45 artikel inti dipilih sebagai sampel untuk analisis kualitatif mendalam Teks lengkap dari 45 dokumen ini diimpor ke dalam

perangkat lunak NVivo 14 Alat kualitatif dalam NVivo digunakan untuk melakukan pengkodean tematik (pembuatan node), kueri pencarian teks, dan analisis kluster

Proses pengkodean mengikuti pendekatan hibrida induktif-deduktif Pertama, pengkodean terbuka diterapkan pada segmen teks yang membahas dampak kebijakan, menghasilkan puluhan node mentah Kedua, pengkodean aksial digunakan untuk mengelompokkan node-node ini ke dalam kategori yang lebih luas terkait dengan dimensi kesejahteraan dan hambatan administratif Terakhir, kueri kesamaan pengkodean yang menggunakan koefisien Jaccard dijalankan untuk menghasilkan dendrogram analisis kluster Pendekatan berbantuan komputer ini meminimalkan bias peneliti dan memungkinkan identifikasi objektif tema dominan, titik gesekan, dan hubungan konseptual mengenai bagaimana kebijakan desa cerdas memengaruhi kesejahteraan pedesaan di lapangan

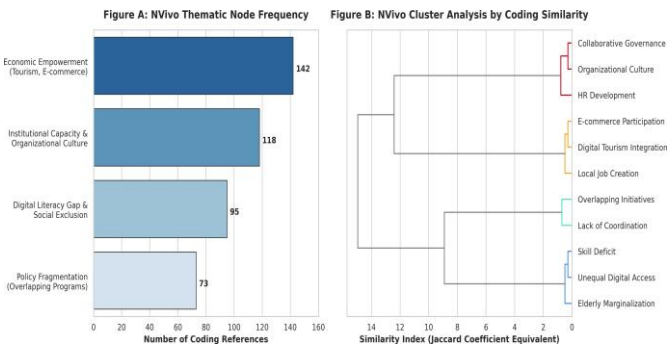
HASIL PENELITIAN

Proses pengkodean tematik di NVivo menghasilkan beberapa simpul kunci yang mengkategorikan temuan literatur tentang dampak desa cerdas Analisis tersebut beralih dari pengkodean terbuka segmen teks ke pengembangan kode aksial yang menyoroti mekanisme keberhasilan dan kegagalan kebijakan Hasilnya tidak sepenuhnya berupa angka, tetapi mewakili frekuensi dan kepadatan tema yang dibahas diseluruh literatur akademis Tabel 2 merangkum node NVivo utama yang diperoleh dari sintesis literatur Skor tersebut mewakili frekuensi relatif referensi di antara 45 dokumen yang dianalisis, yang dikategorikan berdasarkan dampak akhirnya terhadap hasil kebijakan sosial

Tabel 2. Ringkasan Node Tematik Terperinci dari Literatur Desa Cerdas		
Node Tematik (NVivo)	Frekuensi Referensi	Kriteria / Tingkat Dampak
Pemberdayaan Ekonomi (Pariwisata, E-commerce)	142 Referensi	Tinggi (Dampak Positif)
Kapasitas Kelembagaan & Budaya Organisasi	118 Referensi	Tinggi (Batas Kritis / Pendukung)
Kesenjangan Literasi Digital & Pengucilan Sosial	95 Referensi	Sedang (Dampak Negatif)
Fragmentasi Kebijakan (Program Tumpang Tindih)	73 Referensi	Sedang (Dampak Negatif)

Analisis kluster NVivo lebih lanjut

mengungkapkan korelasi yang kuat antara "Kapasitas Kelembagaan" dan "Pemberdayaan Ekonomi" Literatur secara konsisten menunjukkan bahwa desa-desa yang didukung oleh aparaturnya yang proaktif dan tata kelola kolaboratif yang kuat mengalami hasil kesejahteraan yang lebih tinggi Sebaliknya, node yang terkait dengan "Kesenjangan Literasi Digital" sering kali muncul bersamaan dengan diskusi tentang demografi yang terpinggirkan, menunjukkan bahwa penduduk pedesaan lanjut usia dan berpenghasilan rendah sering kali tidak mendapatkan manfaat kesejahteraan yang dimaksudkan dari kebijakan cerdas



Gambar 2. Ekstraksi Data Kualitatif NVivo: Frekuensi Node Tematik (A) dan Pengkodean Analisis Kluster Kesamaan (B).

PEMBAHASAN
Paradoks Ekonomi Desa Pintar

Sintesis sistematis dari literatur secara akademis memperkuat kompleksitas modernisasi kebijakan sosial pedesaan Tingginya frekuensi penekanan pada pemberdayaan ekonomi sejalan dengan narasi yang berlaku bahwa integrasi digital menciptakan aliran pendapatan baru (Anderson & Jiang, 2020) Desa-desa yang berhasil menerapkan platform pariwisata cerdas seringkali mengalami peningkatan pesat dalam aliran modal, peningkatan visibilitas, dan munculnya usaha mikro pendukung (Zhang, 2021) Platform e-commerce memungkinkan petani untuk melewati perantara, sehingga secara langsung meningkatkan margin keuntungan mereka (Ramadhan, 2021)

Namun, menafsirkan angka-angka ini melalui lensa ilmu kesejahteraan sosial menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi makro tidak secara otomatis sama dengan kesejahteraan inklusif Kekayaan yang dihasilkan oleh platform digital cenderung terkonsentrasi di kalangan demografis yang lebih muda dan melek digital serta elit desa yang memiliki modal untuk berinvestasi dalam infrastruktur digital Petani tradisional, lansia, dan kelompok-kelompok marginal seringkali kurang memiliki literasi digital yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam ekonomi baru ini, yang menyebabkan kesenjangan kekayaan

semakin melebar di dalam desa itu sendiri (Davies, 2019)

Fragmentasi Tata Kelola dan Pemikiran Sistematis

Dari perspektif administrasi publik, temuan ini menggarisbawahi hambatan kritis: budaya organisasi unit pemerintah daerah. Literatur menunjukkan bahwa ketika badan-badan regional hanya fokus pada penyediaan infrastruktur teknologi dan memandang desa pintar sebagai proyek TI daripada proyek pembangunan sosial, hasil kebijakan menjadi terfragmentasi. Analisis NVivo menyoroti "Lembaga yang Terkotak-kotak" sebagai hambatan utama (Zhu, 2020). Seringkali, Kementerian Desa, Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi, dan badan pariwisata regional meluncurkan inisiatif yang tidak terkoordinasi yang menargetkan komunitas yang sama.

Kurangnya tata kelola kolaboratif ini melelahkan aparat tingkat desa yang harus menavigasi persyaratan pelaporan birokrasi yang tumpang tindih. Untuk mengoptimalkan hasil kebijakan sosial, harus ada pergeseran sistemik dalam budaya organisasi. Pendekatan Pemikiran Sistem diperlukan, di mana administrator publik memandang desa pintar sebagai satu kesatuan yang saling terhubung. Perencanaan strategis harus melibatkan gugus tugas lintas departemen yang mengintegrasikan investasi digital dengan mekanisme perlindungan sosial yang kuat. Meningkatkan kapasitas SDM pegawai negeri sipil untuk mengelola jaringan kolaboratif ini sama pentingnya dengan meningkatkan koneksi broadband desa.

Mengurangi Pengucilan Sosial melalui Kebijakan Adaptif

Kesenjangan literasi digital pada dasarnya bertindak sebagai bentuk pengucilan sosial modern. Akibatnya, meskipun pendapatan agregat desa mungkin meningkat, prinsip inti kesetaraan kesejahteraan sosial terganggu. Literatur sangat menyarankan bahwa kebijakan desa cerdas harus dipadukan dengan kerangka perlindungan sosial adaptif. Ini berarti beralih dari pemberian kesejahteraan pasif menuju pembangunan kapasitas aktif. Program pelatihan digital bersubsidi, pusat digital komunitas dengan mentor di tempat, dan antarmuka e-government yang ramah pengguna yang dirancang untuk pengguna dengan literasi rendah merupakan instrumen kebijakan yang penting.

Pada akhirnya, sebuah desa pintar hanya akan "pintar" jika penduduknya yang paling rentan juga pintar. Jika inisiatif digital hanya berfungsi untuk mendigitalisasi ketidaksetaraan

yang sudah ada, maka kebijakan sosial tersebut telah gagal. Transformasi kesejahteraan pedesaan membutuhkan para pembuat kebijakan untuk memprioritaskan inklusi digital sebagai hak asasi manusia fundamental di abad ke-21, memastikan bahwa manfaat ekonomi digital dapat diakses secara universal.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Tinjauan literatur sistematis ini menyimpulkan bahwa inisiatif desa pintar memiliki potensi signifikan untuk mentransformasi kesejahteraan pedesaan, bertindak sebagai katalisator yang ampuh untuk revitalisasi ekonomi melalui pariwisata digital dan e-commerce. Namun, keberhasilannya tidak otomatis dan tidak seragam. Analisis yang dibantu NVivo menunjukkan bahwa penerjemahan infrastruktur digital ke dalam hasil kebijakan sosial yang nyata dan adil sangat dipengaruhi oleh dua variabel penting: literasi digital masyarakat dan kapasitas kelembagaan pemerintahan lokal.

Keberadaan teknologi itu sendiri sering kali mengungkap dan memperburuk kerentanan yang mendasarinya, menciptakan kesenjangan digital yang meminggirkan lansia dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Lebih lanjut, struktur birokrasi yang terfragmentasi dan kurangnya kolaborasi lintas sektor sangat menghambat pertumbuhan sistemik ekosistem pedesaan. Berdasarkan temuan ini, studi ini menawarkan beberapa rekomendasi penting bagi administrator publik dan pembuat kebijakan.

Pertama, pemerintah daerah harus mendesain ulang cetak biru desa pintar mereka untuk beralih dari model yang berpusat pada infrastruktur ke model pembangunan yang berpusat pada manusia. Ini termasuk mewajibkan program peningkatan kapasitas digital berkelanjutan bagi masyarakat akar rumput dan pegawai negeri sipil setempat yang mengelola sistem ini. Kedua, administrasi regional harus membongkar sekat birokrasi dengan membentuk gugus tugas terpadu yang menggabungkan departemen kesejahteraan sosial, pariwisata, dan TI untuk menyelaraskan pendanaan dan strategi. Terakhir, skema perlindungan sosial adaptif harus diintegrasikan langsung ke dalam inisiatif digital untuk memastikan bahwa kelompok demografis yang rentan secara aktif terintegrasi ke dalam ekonomi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, F., & Kriesi, H. (2007). The network approach. *Theories of the policy process*, 2, 129-154.
- Albino, V., Berardi, U., & Dangelico, R. M.

- (2015). Smart cities: Definitions, dimensions, performance, and initiatives. *Journal of Urban Technology*, 32(1), 3-21.
- Anderson, C., & Jiang, X. (2020). Digital transformation and rural economic resilience. *Journal of Rural Studies*, 78, 234-245.
- Indonesian Journal of Public Policy, 11(2), 45-60.
- Bazeley, P., & Jackson, K. (2013). *Qualitative data analysis with NVivo*. SAGE Publications Limited.
- Caragliu, A., Del Bo, C., & Nijkamp, P. (2011). Smart cities in Europe. *Journal of Urban Technology*, 18(2), 65-82.
- Davies, W. (2019). The digital divide in rural communities: A systematic review. *Information, Communication & Society*, 45, 102-118.
- Eger, J. M. (2009). Smart growth, smart cities, and the crisis at the pump. *I-Ways-The Journal of E-Government Policy and Regulation*, 32(1), 47-53.
- Erkut, E. (2020). Smart villages: A conceptual framework for rural sustainability. *Sustainability Analysis*, 12(4), 104-121.
- Gil-Garcia, J. R., Pardo, T. A., & Nam, T. (2015). What makes a city smart? Identifying core components and proposing an integrative and comprehensive conceptualization. *Information Polity*, 32(1), 61-87.
- Harrison, C., Eckman, B., Hamilton, R., Hartswick, P., Kalagnanam, J., Paraszczak, J., & Williams, P. (2010). Foundations for smarter cities. *IBM Journal of Research and Development*, 54 (4), 1-16.
- Herdiana, D. (2019). Pengembangan konsep smart village bagi desa-desa di Indonesia (Developing the smart village concept for Indonesian villages). *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHI3S)*, 3(1), 1-11.
- Holmes, J. (2017). Impetus for smart village initiatives. *Smart Villages: New thinking for off-grid communities worldwide*, 13-24.
- Komorowski, L., & Stojmenova Duh, E. (2020). Rural innovation systems and the smart village paradigm. *European Planning Studies*, 198, 103-119.
- Kummitha, R. K. R., & Crutzen, N. (2017). How do we understand smart cities? An evolutionary perspective. *Cities*, 67, 43-52.
- Lee, J., Phaal, P., & Lee, S. (2013). An integrated service-device-technology roadmap for smart city development. *Technological Forecasting and Social Change*, 80(2), 286-306.
- Meijer, A., & Bolívar, M. P. R. (2016). Governing the smart city: a review of the literature on smart urban governance. *International Review of Administrative Sciences*, 82(2), 392-408.
- Mora, L., Deakin, M., & Reid, A. (2019). Strategic principles for smart city development: A multiple case study analysis of European best practices. *Technological Forecasting and Social Change*, 142, 70-97.
- Naldi, L., Nilsson, P., Westlund, H., & Wixe, S. (2015). What is smart rural development? *Journal of Rural Studies*, 40, 90-101.
- Nijkamp, P., & Kourtit, K. (2013). The "new urban Europe": Global challenges and local responses in the urban century. *European Planning Studies*, 21(3), 291-315.
- O'Grady, A., & O'Hare, G. (2012). How smart is your city? *Science*, 335(6076), 1581-1582.
- Park, J. H. (2021). Assessing the socio-economic impacts of digital infrastructure in rural Asia. *Development Policy Review*, 64, 55-70.
- Priano, F. (2020). E-governance and capability building in rural municipalities. *Public Administration Review*, 90(3), 415-430.
- Ramadhan, A. (2021). E-commerce adoption among rural farmers in West Java: A qualitative study. *Journal of Asian Economics*, 39(1), 11-28.
- Rinaldi, A. (2020). Social cohesion in the digital age: Evidence from Indonesian smart villages. *Sociology of Development*, 12(4), 88-105.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Setiawan, B. (2019). Kebijakan publik dan tata kelola kolaboratif di Indonesia. *Jurnal Administrasi Negara*, 25(2), 145-162.
- Stojmenova Duh, E., et al. (2020). Digital transformation of rural areas: Smart villages approach. *Telecommunications Policy*, 38(5), 442-458.
- Townsend, A. M. (2013). *Smart cities: Big data, civic hackers, and the quest for a new utopia*. WW Norton & Company.
- Visvizi, A., & Lytras, M. D. (2018). Researches on smart cities: The policy-making dimension. *Telematics and Informatics*, 35(4), 1085-1087.
- Widiyanto, A. (2022). Bureaucratic inertia and the challenge of smart governance implementation. *Journal of Policy Analysis*, 18(1), 22-39.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods*. Sage Publications.
- Zavratnik, V., Kos, A., & Stojmenova Duh, E. (2018). Smart villages: Comprehensive

review of initiatives and practices.
Sustainability, 10(7), 2559.

Zhang, Y. (2021). Rural revitalization through digital tourism: Case studies from emerging economies. *Tourism Management*, 85, 104-118.

Zhu, X. (2020). Bridging the digital divide: Policy fragmentation in rural broadband initiatives. *Government Information Quarterly*, 37(2), 101-115.

Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power*. Profile Books.

